

GSP Kado Terakhir Trump

Tanggal : Rabu , 04 November 2020

Media : Indo Pos

Halaman : 1&11

Wartawan : dew, nas

Muatan Berita : Netral

Narasumber : Agus Suparmanto (*Menteri Perdagangan*), Agus Gumiwang Kartasasmita (*Menteri Perindustrian*), Retno Marsudi (*Menteri Luar Negeri*), Arya Sandhiyudha (*Pengamat Politik Internasional*), Jarry Massie (*Pengamat Politik Internasional*), Josua Pardede (*Ekonom PT Bank Permata*)

Rubrik : Halaman Depan & Sambungan

Topik : GSP

GSP Kado Terakhir Trump

Jika Kalah dari Biden

JAKARTA—Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat (AS) jarang bergejolak. Relatif aman dan stabil di berbagai sektor. Di tengah hiruk pikuk Pemilihan Presiden (Pilpres) AS, Indonesia justru mendapatkan "hadiah" dari Negeri Paman Sam. "Hadiah" yang dimaksud adalah fasilitas Generalized System of Preference (GSP) dari Pemerintah (AS) yang sudah dinegosiasikan sejak 2,5 tahun lalu.

Fasilitas GSP adalah program preferensi penurunan tarif bea masuk yang diterapkan secara unilateral oleh AS kepada negara berkembang, termasuk Indonesia. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyampaikan, hasil akhir yang positif dari proses peninjauan kembali fasilitas GSP untuk Indonesia ini tentunya memberikan kepastian, baik bagi eksportir Indonesia maupun importir AS. "Bahwa mereka dapat melanjutkan bahkan meningkatkan kegiatan bisnisnya," jelasnya di Jakarta, Selasa (3/11). Mendag menyampaikan, hal itu tentunya merupakan perkembangan yang positif di tengah upaya Indonesia untuk memperkecil dampak pandemi COVID-19.

Dia juga menjelaskan, selama proses peninjauan kembali berlangsung sejak 2018, fasilitas GSP tetap dapat dinikmati Indonesia. [Baca GSP...II](#)

HADIAH PILPRES AS UNTUK INDONESIA

Setelah melalui proses negosiasi selama 2,5 tahun sejak Maret 2018, Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui United States Trade Representative (USTR) resmi mengeluarkan keputusan untuk memperpanjang pemberian fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) kepada Indonesia.

APA ITU GSP?

- Fasilitas perdagangan berupa pembebasan tarif bea masuk yang diberikan secara unilateral oleh Pemerintah AS kepada negara-negara berkembang sejak 1974.
- Indonesia pertama kali mendapatkan fasilitas GSP dari AS pada 1980.
- Terdapat 3.572 pos tarif yang telah diklasifikasikan oleh US Customs and Border Protection (CBP) pada level Harmonized System (HS) 8-digit yang mendapatkan pembebasan tarif melalui skema GSP.
- Mencakup produk-produk manufaktur dan semimanufaktur, pertanian, perikanan, dan industri primer.
- Berdasarkan data statistik dari United States International Trade Commission (USITC) pada 2019 ekspor Indonesia dengan fasilitas GSP mencapai USD2,61 miliar atau setara 13,1 persen dari total ekspor Indonesia ke AS sebanyak USD20,1 miliar.
- Sejak Januari-Agustus 2020, di tengah Pandemi COVID-19, nilai ekspor Indonesia dengan fasilitas GSP tercatat USD1,87 miliar atau naik 10,6 persen dari periode yang sama tahun lalu.



GSP Kado Terakhir Trump

» Sambungan dari halaman 1

Namun, keputusan akhir dari proses peninjauan kembali ini mempertegas bahwa Indonesia tetap dapat menikmati fasilitas ini untuk beberapa tahun ke depan.

Fasilitas GSP ini diberikan dalam bentuk pengurangan tarif bea masuk pada sejumlah produk Indonesia yang dinilai kurang berdaya saing di pasar AS, dibanding produk yang sama atau sejenis dari negara lain. Pada 2019, ekspor Indonesia yang menggunakan fasilitas GSP tercatat senilai USD2,61 miliar atau setara 13,1 persen dari total ekspor Indonesia ke AS yakni USD20,15 miliar.

Pada 2019, total nilai tariff saving yang seharusnya dibayarkan oleh importir AS atas impor dari Indonesia mencapai USD12,1 juta. Besarnya manfaat dari tariff saving tersebut turut membukakan dukungan dunia usaha AS agar Indonesia tetap mendapatkan GSP.

Selanjutnya, saya mengajak pelaku usaha termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk terus mengoptimalkan fasilitas GSP ke AS. Karena utilisasi GSP Indonesia saat ini masih belum maksimal.

"Dari 3.572 pos tarif yang mendapatkan fasilitas GSP, Indonesia baru memanfaatkan-nya untuk 729 pos tarif barang saja, atau sekitar 20,4 persen. Oleh sebab itu, Kemendag akan terus bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait serta pelaku usaha dan industri agar dapat meningkatkan variasi ekspor dan memanfaatkan pasar AS yang masih terbuka," lanjutnya.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga menilai, perpanjangan fasilitas GSP mampu menjadi peluang untuk memperluas pasar produk RI di AS. "Kemudahan ini harus dapat dimanfaatkan secara strategis oleh sektor industri dalam negeri untuk meningkatkan akses produk Indonesia ke pasar AS," ujar Menteri

Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, terpisah, sebelumnya.

Dia menjelaskan, GSP dari AS perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya karena kebijakan perpanjangan oleh pemerintah AS jarang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. "GSP diperkirakan telah menghemat sekitar USD92 juta biaya bea masuk bagi produk Indonesia ke AS pada 2019," terangnya.

Pada 2019, Indonesia merupakan negara asal impor terbesar setelah Thailand. Ekspor Negeri Gajah Putih ke AS dengan menggunakan fasilitas GSP mencapai USD4,8 miliar atau 23,71 persen dari total impor GSP AS.

Selain itu, Indonesia juga berpeluang meningkatkan pangsa pasar bagi produk-produk yang selama ini diisi oleh Thailand. Berdasarkan hasil review, terdapat beberapa produk ekspor Thailand yang tidak lagi mendapatkan fasilitas GSP dari AS. "Dengan demikian, produk kita bisa lebih kompetitif dibandingkan Thailand. Sehingga kita berpeluang meningkatkan ekspor dan mengisi pasar di AS dengan merebut pangsa pasar Thailand tersebut," ulasnya.

Beberapa produk yang berpeluang untuk ditingkatkan pangsa pasarnya adalah pompa bahan bakar/pelumas (HS 8413.30.90), kacamata (HS 9004.90.00), sepeda motor dengan piston (HS 8711.50.00), wastafel/bak cuci (HS 6910.10.00), papan/panel/konsol/meja (HS 8537.10.91), sekrup dan baut (HS 7318.15.80), alat kelengkapan pipa dari tembaga, perangkat makan (HS 3924.10.40), serta bingkai kayu untuk lukisan (HS 4414.00.00).

"Meskipun tren pertumbuhan ekspor beberapa produk unggulan kita mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat pandemi, ternyata ekspor ke AS menunjukkan peningkatan yang didukung oleh ekspor produk-produk yang masuk dalam GSP," akunya.

Dirinya mengapresiasi upaya

diplomasi dengan pemerintah AS mengenai isu GSP. Selain memperkuat komitmen strategis antara kedua negara, pemerintah menilai kebijakan terkait GSP juga memberikan manfaat positif bagi Indonesia serta menguntungkan bisnis AS. Sedangkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menggarisbawahi pentingnya fasilitas GSP. "Saya mendorong bisnis AS untuk lebih banyak berinvestasi di Indonesia. Termasuk untuk proyek-proyek di pulau-pulau terluar Indonesia, seperti Pulau Natuna," ajaknya.

Bagian dari Strategi Politik?

Pengamat Politik Internasional Arya Sandhiyudha mengatakan, letak negara Indonesia secara geografis sangat strategis dan dibutuhkan AS. "Tiongkok sudah terlibat jauh di ASEAN, Asia, dan bahkan berhasil memecah sikap terkait sengketa di Laut Cina Selatan," ujar Arya Sandhiyudha kepada INDOPOS, Selasa (3/11).

Hal tersebut sangat mengkhawatirkan bagi Amerika. Baik dari sektor ekonomi maupun pertahanan maritim.

"Itu sebabnya, AS membentukkan Indonesia sebagai pemimpin di ASEAN untuk mengantisipasi kepentingan-kepentingannya," sebutnya. Namun, karakter Presiden Trump yang cenderung isolasionis,

membuat dirinya banyak menarik diri dari hubungan internasional. Sehingga, hubungan Trump dengan Asia menjadi renggang. Bahkan, untuk kunjungan ke Asia saja, dia hanya mengirim pejabat selevel menteri-nya untuk kunjungan ke Asia.

"Menteri luar negeri baru ini saja. Kedatangannya pun sudah sangat akhir (jabatan) dan dinilai terlambat," ucapnya. Sementara, apabila Biden terpilih, menurut Arya, maka peran internasional akan lebih banyak, seperti saat pemerintahan Obama sebelumnya.

Dia memastikan, apabila Amerika masuk dalam satu kawasan, maka mereka akan melakukan intervensi politik

dan ekonomi. "Ada plus minus apabila AS peduli dengan salah satu kawasan. Karena, tidak otomatis menguntungkan kawasan tersebut juga," bebernya.

Sementara itu, Pengamat Politik Internasional Jarry Massie menuturkan, kedatangan menteri luar negeri Amerika Serikat bertujuan untuk memperlancar hubungan dengan Indonesia. Selain menjalin kerja sama partner dagang, nampaknya Amerika tak ingin melepas Indonesia ke dalam cengkeraman Tiongkok.

Dengan bahasa lain, AS ingin menyampaikan Indonesia sangat penting di jalur Asia-Pasifik. "Tidak ingin (Indonesia) lepas ke tangan Tiongkok yang menjadi enemy of trade (musuh dagang) dari negeri Paman Sam ini," paparnya.

Ekonom Bank Permata Josua

Pardede punya pendapat lain. Dia mengatakan, siapapun pemenang Pilpres AS, tidak akan ada perbedaan yang signifikan dalam kebijakan dagang Biden maupun Trump.

Keduanya, dia yakini akan menerapkan kebijakan yang bersifat inward-looking, meskipun dengan derajat yang berbeda. "Slogan keduanya, American First dan Made in All of America menekankan prioritas pemerintah AS terhadap manufaktur domestik. Kesamaan keduanya juga terlihat dari sentimen yang disajikan terkait invasi produk dari Tiongkok," ulasnya di Jakarta, Selasa (3/11).

Dia menjelaskan, kedua kandidat sama-sama menganggap produk Tiongkok mengganggu aktivitas manufaktur di AS. Khusus Biden, lanjutnya, bakal

cenderung menekan Tiongkok melalui protokol multilateral dan tidak menekankan pada kebijakan tarif.

"Biden juga menekankan bahwa kerja sama dengan negara dekat AS harus diperkuat. Sehingga selain Tiongkok, sangat mungkin kerja sama dagang antara AS dan negara lainnya dapat membaik," lanjutnya.

Dengan kebijakan dagang keduanya yang masih menganggap Tiongkok sebagai kompetitor, Josua memperkirakan kebijakan dagang terhadap Negeri Panda tidak banyak berubah. Sementara itu, Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) Muhammad Lutfi melihat adanya tren yang baik dalam kerja sama AS dan Indonesia saat dia mulai bertugas kurang dari dua bulan ini.

"Sebulan saya bertugas, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sudah berkunjung ke Amerika Serikat. Kemudian Menteri Luar Negeri AS juga tidak lama kemudian ke Jakarta," ujarnya.

Dengan permulaan tersebut, Lutfi mungkin bisa menghubungkan banyak kerja sama antara dua negara. "Kunjungan Menhan sebuah negara adalah bukti kedekatan dengan negara yang dia kunjungi," sebutnya.

Apalagi, kini Indonesia dan AS sedang melakukan pembahasan kesepakatan dagang terbatas (limited trade deal/ LTD). "Dengan demikian, apapun hasil pemilihan presiden nantinya diharapkan tidak mempengaruhi pembahasan kesepakatan. Kepentingan dalam LTD ini kita buat sebagai kepentingan bersama," tutupnya. (nas/dew)